

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bagaimana Pandangan fikih terhadap **para pegawai atau karyawan (profesional) yang bekerja di perusahaan konvensional atau usaha ribawi (tidak halal)?**

Begitupula bagaimana pandangan fikih terhadap pegawai atau karyawan yang bekerja di perusahaan yang melayani produk konvensional dan syariah?

Jawaban



Dr. Oni Sahroni, MA

Perlu kita ketahui dengan lebih jelas tentang kaidah atau ketentuan yang berlaku dalam hukum fikih terkait perihal bekerja di entitas atau lembaga konvensional. **Lembaga konvensional yang dimaksud**

terdiri atas 2 bagian:

Pertama

Perusahaan atau entitas yang core bisnisnya tidak halal

Kedua

Perusahaan atau entitas yang core bisnisnya bisa produk syariah atau konvensional

**Bagian pertama : Untuk perusahaan (entitas) konvensional yang core bisnisnya tidak halal**

a) Yaitu perusahaan (entitas) yang kegiatan usahanya mengatur atau memperjual belikan **produk yang tidak halal** - baik secara langsung ataupun tidak langsung / baik haram karena fisik (seperti babi dan khamr) maupun haram karena nonfisik (seperti pendapatan dari transaksi pinjaman berbunga)-.



onisahronii



Telegram.me/onisahronii



Rumah Wasatia

Dr. Oni Sahroni, MA

**b) Di antara contohnya adalah** bekerja di *bar / diskotik* (minuman keras dan asusila), usaha produksi (distribusi) narkoba, mapia korupsi, mapia hukum, bank – khusus - konvensional, usaha produksi pornografi dan pornoaksi, usaha pencucian uang, dan sejenisnya.

**c) Menurut fikih,** bekerja di usaha-usaha tersebut di atas itu tidak diperkenankan (haram) dalam Islam, termasuk setiap orang yang terlibat dalam usaha tersebut juga tidak diperkenankan dalam Islam.

**d) Contohnya dalam masalah riba,**

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir, beliau mengatakan, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, Pemberi riba, pencatat, dan saksinya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Mereka itu dosanya sama.’” (HR. Muslim)

Begitu pula dalam masalah risywah,

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Dari Abdullah Ibnu Amar Ibnu al-'Ash Radliyallaahu 'anhu bahwa " Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat orang yang memberi dan menerima suap". (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Begitu pula dalam bab-bab lain, Allah tidak hanya mengharamkan pelakunya langsung, tetapi juga pelaku tidak langsung. Sesuai dengan kaidah sadduz zari'ah (سد الذريعة), **meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.**



### Dr. Oni Sahroni, MA

أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي حُرْمَةِ الْإِسْهَامِ فِي شَرَكَاتٍ غَرَضُهَا الْأَسَاسِيُّ مُحَرَّمٌ، كَالْتَّعَامُلِ بِالرَّبَا أَوْ إِنْتَاجِ الْمُحَرَّمَاتِ أَوْ الْمُتَاجَرَةِ بِهَا. وَالْأَصْلُ حُرْمَةُ الْإِسْهَامِ فِي شَرَكَاتٍ تَتَّعَمَلُ أحيانًا بِالْمُحَرَّمَاتِ، كَالرَّبَا وَنَحْوَهُ، بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ أَنْشِطَتَهَا الْأَسَاسِيَّةَ مَشْرُوعَةٌ

bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa membeli saham pada perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan usaha yang haram, seperti transaksi ribawi, memproduksi barang yang haram, jual beli barang yang haram. Pada prinsipnya, haram membeli saham pada perusahaan yang kadang- kadang melakukan transaksi yang haram seperti transaksi ribawi dan sejenisnya, walaupun kegiatan utama perusahaan tersebut itu adalah usaha yang halal.

Di antara dalil (*istisyhad*) yang digunakan adalah kaidah fikih berikut :

"إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ".

Jika ada dana halal dan haram bercampur, maka menjadi dana haram.

Sesuai kaidah fikih ini, jika dana halal bercampur dengan dana haram, **maka hukum haram lebih diunggulkan dan menjadi hukum keseluruhan dana tersebut**

**Bagian kedua :** Bekerja di lembaga atau entitas atau perusahaan yang core bisnisnya bergerak dalam bidang usaha konvensional dan usaha syariah.

- ❑ Seperti halnya beberapa **divisi di kementrian keuangan yang mengatur konvensional dan syariah**. Begitu pula di **bank umum yang mengatur kegiatan konvensional dan unit usaha syariah**. Demikian pula di Bank Indonesia yang mengatur bank syariah dan bank konvensional.



**Dr. Oni Sahroni, MA**

Jika ditelaah, ada beberapa pendapat dari para ulama terkait hal ini:

**Pendapat pertama** dibagi dalam dua kondisi:

**Pendapat kedua,**

**Kondisi pertama**, jika keterlibatan atau bekerja di perusahaan tersebut on mission (membawa nilai-nilai Islam) dengan menempati posisi-posisi strategis, seperti bagian treasury, dengan misi bisa membawa nilai Islam atau memberikan kebijakan untuk memperluas kewenangan syariah di unit syariah, misalnya, maka keterlibatannya dalam usaha ini diperkenankan sesuai dengan kaidah

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Jika sebuah kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya”

**Kondisi kedua**, jika keterlibatannya hanya mencari ma'isyah atau pendapatan maka tidak diperkenankan kecuali dalam kondisi darurat dengan 2 parameter: tidak ada alternatif usaha lain yang halal dan pekerjaannya di entitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang wajib pula, seperti kewajiban keluarga dan anak-anak. Hal ini sesuai dengan kaidah

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang”

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Apa yang dibolehkan karena adanya darurat diukur menurut kadarnya”



onisahronii



Telegram.me/onisahronii



Rumah Wasatia





**Pendapat kedua**, bekerja di entitas ini sudah **menjadi umumul balwa** (suatu praktik yang tidak bisa dihindarkan) bahkan sistem ini sekarang menjadi sistem yang mengakar. Oleh karena itu, jika kita hukumi bahwa seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan perekonomian harus resign dan meninggalkan pekerjaannya, hal itu akan melumpuhkan seluruh perekonomian, tidak hanya konvensional, tetapi juga syariah. Dengan demikian, berdasarkan umumul balwa ini, diperbolehkan untuk bekerja di entitas ini sesuai dengan kaidah umumul balwa.

Banyak para ulama yang menegaskan tentang hal ini, beberapa ulama diantaranya :

**Ibnu Nujaim menjelaskan :**

قَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ الْحَنْفِيُّ : أَمَّا مَسْأَلُهُ مَا إِذَا  
اخْتَلَطَ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ فِي الْبَلَدِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ  
الشَّرَاءُ وَالْأَخْذُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ  
مِنَ الْحَرَامِ.

jika terjadi di sebuah negara, dana halal bercampur dengan dana haram, maka dana tersebut boleh dibeli dan diambil, kecuali jika ada bukti bahwa dana tersebut itu haram.

**An-Nawawi menjelaskan sebagai berikut:**

قَالَ النَّوَوِيُّ : الْخُلُطُ فِي الْبَلَدِ حَرَامٌ لَا يَنْحَصِرُ بِحَلَالٍ يَنْحَصِرُ لَمْ  
يَحْرُمِ الشَّرَاءُ مِنْهُ بَلْ يَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِتِلْكَ الْعَيْنِ  
عَلَامَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مِنَ الْحَرَامِ فَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنَ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَكِنْ  
تَرْكُهُ وَرُغْ مَحْبُوبٌ وَكُلَّمَا كَثُرَ الْحَرَامُ تَأَكَّدَ الْوَرَعُ.

jika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas, maka dana tersebut boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram, jika tidak ada bukti, maka tidak haram. Tetapi meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai Allah Swt., setiap kali dana haram itu banyak, maka harus disikapi dengan wara'.

Ibnu Taimiyah menjelaskan sebagai berikut:

Dr. Oni Sahroni, MA

فَأَمَّا الْمُتَعَامِلُ بِالرِّبَا فَالْغَالِبُ عَلَى مَالِهِ الْحَلَالُ، إِلَّا أَنْ يُعْرِفَ الْكُرْهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا بَاعَ أَلْفًا بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ، فَالزِّيَادَةُ هِيَ الْمَحْرَمَةُ فَقَطُّ، وَإِذَا كَانَ فِي مَالِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ وَاخْتَلَطَ لَمْ يَحْرُمِ الْحَلَالُ بَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ الْحَلَالِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَالُ لِشَرِيكَيْنِ، فَاخْتَلَطَ مَالُ أَحَدِهِمَا بِمَالِ الْآخَرِ فَإِنَّهُ يُقَسَّمُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ ) . . وَكَذَلِكَ مَنْ اخْتَلَطَ بِمَالِهِ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، أُخْرِجَ قَدْرُ الْحَرَامِ وَالْبَاقِي حَلَالٌ لَهُ

Adapun orang yang bertransaksi secara ribawi, maka yang dominan adalah halal kecuali diketahui bahwa yang dominan adalah makruh. Karena jika seseorang menjual 1000 seharga 1.200, maka yang haram adalah marginnya saja. jika pendapatannya terdiri dari dana halal dan haram yang bercampur, maka bagian yang haram ini tidak mengharamkan bagian yang halal. ia bisa mengambil bagian yang halal tersebut, sebagaimana jika dana milik dua orang syarik, dana syirkah telah bercampur dan menjadi milik keduanya, maka dana tersebut dibagi kepada dua syarik tersebut. Begitu pula dana halal bercampur dengan dana haram, maka prosentase dana haram dikeluarkan, maka sisanya adalah dana halal.



Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan ***bahwa bekerja di perusahaan atau entitas yang core bisnisnya tidak halal itu tidak diperkenankan dalam Islam. Tetapi jika bekerja di perusahaan atau entitas yang kegiatan usahanya adalah usaha yang halal dan juga melakukan usaha yang tidak halal, maka para ulama berbeda pendapat.***

**Pertama,** Jika bekerja di perusahaan tersebut on mission itu diperkenankan. Namun, jika bekerja di perusahaan tersebut bukan on mission tetapi mencari pendapatan semata, maka tidak diperkenankan kecuali dalam kondisi darurat yaitu tidak ada alternatif lain yang halal dan pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mubah dan wajib.

**Pendapat kedua,** itu diperkenankan karena ada umumul balwa (sesuatu yang tidak bisa dihindarkan).



onisahronii



Telegram.me/onisahronii



Rumah Wasatia